



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNANDAR**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **269924**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.898.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/252 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 410.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 612.000.000
3. Tanah Seluas 1075 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 720.000.000
4. Tanah Seluas 2635 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 8210 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 412.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
7. Tanah Seluas 8170 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
8. Tanah Seluas 8480 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
9. Tanah Seluas 12190 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 459.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 205.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.280.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	84.106.897
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.207.386.897
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.207.386.897

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.